



LAPORAN KEGIATAN KOMISI VI DPR RI
DALAM MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2022-2023
Tanggal 14 Maret – 15 Mei 2023
(Masa Sidang Mulai Tanggal 14 Maret – 13 April 2023
Dan Masa Reses Mulai Tanggal 14 April – 15 Mei 2023)
Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI
Tanggal 18 Januari 2023

Berdasarkan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *juncto* Pasal 59 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menjelaskan tentang tugas Komisi dalam bidang pembentukan undang-undang (legislasi), anggaran, dan pengawasan. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Komisi VI DPR RI pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 adalah sebagai berikut:

I. FUNGSI LEGISLASI

Terkait dengan fungsi Legislasi, pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 Komisi VI DPR RI telah melaksanakan :

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada tanggal 15 Maret 2023 dengan Kepala BKD DPR RI, acara Pemaparan Kepala Badan Keahlian Dewan atas Naskah Akademik dan RUU tentang Pelindungan Konsumen, dengan kesimpulan antara lain :
 1. Komisi VI DPR RI menerima paparan Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI tentang Naskah Akademik dan RUU Tentang Perlindungan Konsumen dan mengapresiasi atas penyusunan Naskah Akademik dan RUU yang disampaikan kepada Komisi VI DPR RI.

2. Komisi VI DPR RI menilai semangat dalam penyusunan RUU tentang Perlindungan Konsumen sudah sesuai, namun terdapat beberapa hal yang perlu diakomodir dalam RUU tersebut diantaranya yaitu:
 - a. Perlindungan terhadap konsumen online, mengingat seringkali tampilan produk di halaman online tidak sesuai dengan produk yang diterima oleh konsumen.
 - b. Tanggung jawab importir dan distributor yang terkait garansi barang yang dijual.
 - c. Produk jasa yang perlu diatur, khususnya dalam Bidang Kesehatan dan Kedokteran.
 - d. Penyelesaian perselisihan konsumen, khususnya konsumen usia anak-anak yang masih perlu diperbaiki.
 - e. Pengaturan tentang sanksi pelaku usaha baik sanksi administratif, ganti rugi maupun pidana yang perlu dipertegas.
 - f. Perlunya sinkronisasi dengan berbagai undang-undang sektoral yang dikeluarkan setelah UU tentang Perlindungan Konsumen
 3. Dalam rangka meningkatkan daya saing, diperlukan penentuan kementerian dan lembaga yang bertanggung jawab atas proses legislasi RUU Tentang Perlindungan Konsumen sesuai dengan urgensi penyusunan RUU tentang Perlindungan Konsumen.
 4. RUU Tentang Perlindungan konsumen ini diharapkan dapat menjawab tantangan jangka panjang terkait dengan prosperity serta penguatan peran Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam RUU tentang Perlindungan Konsumen.
 5. Meminta kepada Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI untuk dapat menyusun kembali Naskah Akademik dan RUU Tentang Perlindungan Konsumen sesuai dengan masukan Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI.
-
2. Rapat internal Komisi VI DPR RI pada tanggal 29 Maret 2023, menyetujui Pembentukan Panja Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Pelindungan Konsumen Komisi VI DPR RI.

3. Rapat internal Komisi VI DPR RI pada tanggal 29 Maret 2023, menetapkan Program Kerja Panja Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Pelindungan Konsumen Komisi VI DPR RI

II. FUNGSI ANGGARAN

Pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023, Komisi VI DPR RI tidak ada kegiatan yang terkait dengan Anggaran.

III. FUNGSI PENGAWASAN

Terkait dengan fungsi pengawasan, pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 Komisi VI DPR RI telah melaksanakan :

A. RAPAT PIMPINAN DAN RAPAT INTERN KOMISI VI DPR RI

Pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023, berdasarkan hasil Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI tanggal 18 Januari 2023 dan Pendapat Pimpinan Fraksi dan sesuai dengan Pasal 54 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Rapat-rapat di DPR RI dilaksanakan secara fisik. Komisi VI DPR RI telah melaksanakan Rapat Intern Komisi VI DPR RI yaitu :

1. Rapat Intern Komisi VI DPR RI pada tanggal 14 Maret 2023 pembahasan mengenai Penetapan Program Kerja Komisi VI DPR RI Masa Sidang IV Tahun Sidang 2022-2023, dengan kesimpulan antara lain :
 - 1) Akan dilaksanakan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan mitra Kementerian dan BUMN terkait dengan stabilisasi harga dan pasokan barang kebutuhan pokok, dan BUMN bidang transportasi dan jasa layanan transportasi, Perbankan, dan Energi, dan Pangan terkait kesiapan menjelang Ramadhan dan Perayaan Idul fitri 1444 H dan lain-lain.
 - 2) Direncanakan akan membahas RUU Usul DPR yaitu Naskah Akademik dan RUU tentang Perlindungan Konsumen, dengan melakukan beberapa rapat dengan Kepala Badan Keahlian DPR RI, Kementerian Perdagangan, dan melakukan kunjungan kerja ke beberapa perguruan tinggi untuk meminta masukan terkait RUU tersebut, diantaranya yakni ke:
 - a. Tanggal 4 s.d 6 April 2023 akan melaksanakan kunjungan ke:

- 1) Universitas Padjajaran Bandung Provinsi Jawa Barat
 - 2) Universitas Parahyangan Bandung Provinsi Jawa Barat
- b. Tanggal 10 s.d 12 April 2023 akan melaksanakan kunjungan ke:
- 1) Universitas Gajah Mada, Provinsi D.I. Yogyakarta
 - 2) Universitas Islam Indonesia, Provinsi D.I. Yogyakarta
- c. Tanggal 9 sd 15 Mei 2023, akan melaksanakan kunjungan ke Canberra Australia.
- 3) Masalah RUU Usul DPR yaitu Naskah Akademik dan RUU tentang Perlindungan Konsumen akan menjadi legacy Komisi VI DPR RI.
 - 4) Rapat Dengar Pendapat dengan beberapa Holding BUMN antara lain
 - a) Holding Minyak dan Gas : Pertamina
 - b) Holding Pangan : RNI, Bulog
 - c) Holding Transportasi
 - d) Holding Energi
 - e) Holding Aviasi : Sarinah
 - 5). Kunjungan Kerja Panja Transisi Energi ke Listrik pada tanggal 16 s.d 18 Maret 2023 akan melakukan peninjauan Perakitan sepeda motor listrik gesits, pabrik wika industri manufaktur (WIMA) Cileungsi, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat.
 - 6). Kunjungan Kerja Panja Komoditas pada tanggal 29 s.d 31 Maret 2023 akan melakukan peninjauan terhadap tata Kelola terkait perdagangan komoditas CPO, dan komoditas tambang, ke provinsi Lampung dan Bangka Belitung.
 - 7). Kunjungan Kerja Reses pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023, yang diusulkan pada tanggal 14 s.d 18 April 2023 ke 3 (tiga) Provinsi yakni, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur.
 - 8). Kunjungan Kerja Diplomasi Parlemen fungsi pengawasan akan melakukan kunjungan ke Sydney Australia tanggal 9 sd 15 Maret 2023.

B. RAPAT KERJA/RDP/RDPU/PANJA KOMISI VI DPR RI

Rapat menyetujui pada Masa Sidang IV Tahun Sidang 2022-2023, Komisi VI DPR RI untuk menjadwalkan Rapat Kerja/RDP/RDPU/Panja sebagai berikut :

1. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan RI pada tanggal 15 Maret 2023, dengan pembahasan Permasalahan kenaikan harga minyak goreng dan kelangkaan minyak kita dan harga komoditas dan kesiapan kementerian perdagangan dalam stabilisasi harga dan pasokan barang kebutuhan pokok menjelang Ramadhan dan Idul Fitri. Dengan kesimpulan antara lain :
 1. Komisi VI DPR RI mendapat penjelasan Menteri Perdagangan terkait upaya Stabilisasi Harga Minyak Goreng melalui Program Minyak Goreng Rakyat dan pasokan barang pokok serta mengantisipasi potensi kenaikan harga pada Hari Besar Keagamaan Nasional Puasa – Lebaran 1444H/2023.
 2. Komisi VI DPR RI mengapresiasi kinerja Kementerian Perdagangan yang telah berhasil mengendalikan kenaikan harga minyak goreng dengan meningkatkan *Domestic Market Obligation* (DMO) Minyak Goreng Rakyat menjadi 450 ribu ton per bulan pada periode Februari – April 2023 dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Curah Rakyat dan Kemasan Minyakita sebesar Rp14.000/lt.
 3. Komisi VI DPR RI mendorong Kementerian Perdagangan untuk menertibkan penjualan baju impor bekas (*Thrifting*) dengan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait.
 4. Komisi VI DPR RI mengusulkan kepada kementerian perdagangan untuk melakukan relaksasi petunjuk teknis dalam rangka mempercepat ketersediaan Minyak Goreng kemasan Minyakita di pasaran sesuai target 40% dari total DMO.
 5. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian Perdagangan untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

2. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN RI pada tanggal 20 Maret 2023 pembahasan mengenai Progress Penanganan Plumpang dan Progres Rencana Program BUMN Tahun 2023. Dengan kesimpulan antara lain :
 1. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN RI untuk melaksanakan penanganan dampak insiden TBBM Plumpang sebagai bagian dari solusi terintegrasi Pertamina termasuk pembangunan *Buffer Zone* Plumpang dalam jangka waktu 3 Bulan.
 2. Komisi VI DPR RI mendorong Kementerian BUMN RI untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi lainnya dalam kaitan jarak aman antara objek vital nasional perusahaan BUMN dengan pemukiman masyarakat sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku, termasuk dokumen AMDAL, penyediaan *green barrier* dan pagar pembatas.
 3. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN untuk memperbaiki konsistensi pengelolaan aset tanah dan bangunan termasuk melakukan audit, inventarisasi, valuasi dan pengamanan aset dalam objek vital yang ditangani BUMN, antara lain TBBM Plumpang serta objek vital nasional lainnya.
 4. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN RI untuk memastikan *timeline*, dan strategi mitigasi risiko perusahaan yang tepat sehingga rencana aksi korporasi perusahaan BUMN pada tahun 2023 dapat tercapai sesuai target.
 5. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian BUMN RI untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.
3. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN RI pada tanggal 3 April 2023, pembahasan mengenai Aksi Korporasi PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk tentang Penataan B2C dan B2B di PT Telkom Grup;

4. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Wakil Menteri BUMN II RI pada tanggal 12 April 2023, Pembahasan terkait PMN untuk Aviata dan IFG, dengan kesimpulan antara lain :
 1. Komisi VI DPR RI telah mendapat penjelasan usulan PMN yang diajukan oleh Kementerian BUMN untuk PT Aviata Pariwisata Indonesia (Persero) dalam Alokasi Cadangan Investasi APBN 2023 sebesar Rp1.193 Milyar untuk ditempatkan ke ITDC (pengembangan KEK Mandalika) dan HIN (KEK Sanur) dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) dalam Alokasi Cadangan Investasi APBN 2023 sebesar Rp3.000 Milyar untuk diteruskan kepada IFG Life akan digunakan sebagai *underlying* pengalihan liabilitas polis dan tetap menjaga tingkat kesehatan keuangan IFG Life.
 2. Komisi VI DPR RI akan mendalami penjelasan usulan PMN yang diajukan oleh Kementerian BUMN ini pada masa sidang berikutnya sebagai dasar pengambilan keputusan persetujuan usulan PMN untuk PT Aviata Pariwisata Indonesia (Persero) dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).
 3. Komisi VI DPR RI mendorong Kementerian BUMN untuk berkoordinasi dengan *stakeholders* terkait PMN yang berasal dari penerimaan hasil sitaan atau rampasan Kejaksaan Agung terkait tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) yang telah mendapat putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dilelang, sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 dalam Pasal 40 Ayat (6).
 4. Komisi VI DPR RI meminta PT Aviata Pariwisata Indonesia (Persero) untuk memberikan penjelasan secara detail bagaimana bisnis model dan *multiplier effect* dari pengembangan KEK Mandalika.
 5. Komisi VI DPR RI meminta PT Aviata Pariwisata Indonesia (Persero) dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.
5. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Wakil Menteri BUMN I RI pada tanggal 12 April 2023, Pembahasan mengenai Rencana Restrukturisasi PT Rekrayasa Industri;

6. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan PT Pertamina (Persero) pada tanggal 14 Maret 2023, pembahasan mengenai Tindak Lanjut Hasil RDP Komisi VI DPR RI tanggal 31 Januari 2023, dengan kesimpulan antara lain :
 1. Komisi VI DPR RI mendapat penjelasan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) terkait insiden di Integrated Terminal Jakarta Plumpang dan mendukung Pertamina dalam penanganan korban serta meminta untuk dilanjutkan secara optimal.
 2. Komisi VI DPR RI meminta Pertamina untuk memastikan keamanan pasokan Bahan Bakar Minyak wilayah Jabodetabek pasca insiden.
 3. Komisi VI DPR RI mendorong Pertamina untuk segera menyelesaikan *Buffer Zone* berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi serta aparat terkait, sehingga dapat memitigasi risiko sesuai standart keselamatan, kesehatan dan lingkungan (HSE) yang berlaku.
 4. Komisi VI DPR RI meminta PT Pertamina (Persero) untuk membuat *safety audit* dan *road map* terkait penanganan permasalahan di 9 (sembilan) lokasi PT Pertamina Patra Niaga dan 3 (tiga) lokasi PT Kilang Pertamina Internasional yang akan disampaikan pada pertemuan selanjutnya.
 5. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada PT Pertamina (Persero) untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.
7. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan PT Sarinah pada tanggal 21 Maret 2023, pembahasan mengenai Tata Kelola Perusahaan dan Kinerja tahun 2022;
8. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan PT KAI Persero, PT Kereta Commuter Indonesia dan PT INKA pada tanggal 27 Maret 2023, pembahasan mengenai Rencana Impor Kereta Rel Listrik (KRL) bekas dari Jepang oleh PT Kereta Commuter Indonesia dan lain-lain, dengan kesimpulan antara lain :

1. Komisi VI DPR RI mendorong PT Kereta Api Indonesia/KAI (Persero) dan PT Kereta Commuter Indonesia/KCI untuk mendahulukan produksi industri kereta dalam negeri dan memperhatikan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang tinggi dalam menyediakan sarana transportasi masyarakat.
 2. Komisi VI DPR RI merekomendasikan PT Kereta Api Indonesia/KAI (Persero), PT Kereta Commuter Indonesia/KCI dan PT INKA (Persero) untuk memprioritaskan modernisasi/retrofit sarana KRL untuk memenuhi kebutuhan penyediaan sarana transportasi masyarakat pada tahun 2024.
 3. Komisi VI DPR RI meminta PT Kereta Api Indonesia/KAI (Persero) dan PT Kereta Commuter Indonesia/KCI untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan transportasi masyarakat.
 4. Komisi VI DPR RI akan menindaklanjuti hasil Rapat Dengar Pendapat ini pada Rapat Kerja berikutnya dengan Menteri BUMN RI.
 5. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada PT Kereta Api Indonesia/KAI (Persero), PT Kereta Commuter Indonesia/KCI dan PT INKA (Persero) untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.
-
9. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk, Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Tbk, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk pada tanggal 28 Maret 2023, pembahasan mengenai Kinerja Keuangan Korporasi tahun 2022, Strategi mitigasi menghadapi potensi resesi ekonomi 2023 dan lain-lain, dengan kesimpulan antara lain :
 1. Komisi VI DPR RI mengapresiasi kinerja yang telah dilakukan oleh PT BRI (Persero) Tbk, PT BNI (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT BTN (Persero) Tbk di Tahun 2022 yang tetap berjalan

dengan baik di tengah kondisi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat Pandemi Covid-19.

2. Komisi VI DPR RI meminta PT BRI (Persero) Tbk, PT BNI (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT BTN (Persero) Tbk untuk meningkatkan fungsi intermediasi guna menggerakkan perekonomian nasional.
 3. Komisi VI DPR RI mengapresiasi kontribusi PT BRI (Persero) Tbk, PT BNI (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT BTN (Persero) Tbk dalam rangka penyaluran Kredit ke UMKM serta dukungan kepada UMKM agar naik kelas dan *Go Global*.
 4. Komisi VI DPR RI meminta PT BRI (Persero) Tbk, PT BNI (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT BTN (Persero) Tbk untuk terus melakukan relaksasi maupun restrukturisasi kredit khususnya bagi nasabah yang terdampak pasca pandemi Covid-19 dengan tetap berpedoman pada regulasi Otoritas Jasa Keuangan.
 5. Komisi VI DPR RI meminta PT BRI (Persero) Tbk, PT BNI (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT BTN (Persero) Tbk untuk mengantisipasi potensi resesi ekonomi global yang resikonya tidak bisa diprediksi.
 6. Komisi VI DPR RI meminta kepada PT BRI (Persero) Tbk, PT BNI (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT BTN (Persero) Tbk untuk memberikan jawaban tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.
-
10. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala BKD DPR RI pada tanggal 29 Maret 2023, pembahasan terkait Finalisasi Naskah Akademik dan RUU tentang Pelindungan Konsumen, dengan kesimpulan antara lain :
 1. Komisi VI DPR RI menerima Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Konsumen dari Badan Keahlian Setjen DPR RI.

2. Seluruh masukan yang disampaikan oleh anggota Komisi VI DPR RI pada Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Keahlian Setjen DPR RI akan menjadi bahan masukan dalam penyempurnaan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Konsumen.
-
11. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Citilink Indonesia, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), dan Perum Damri pada tanggal 3 April 2023, pembahasan tentang kesiapan BUMN Transportasi menghadapi mudik puasa dan hari raya idul fitri tahun 2023 dan lain-lain, dengan kesimpulan antara lain :
 1. Komisi VI DPR RI mendukung upaya PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), Perum DAMRI dan PT Citilink Indonesia dalam memastikan kesiapan BUMN transportasi menghadapi Hari Raya Idul Fitri Tahun 2023.
 2. Komisi VI DPR RI meminta PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), Perum DAMRI dan PT Citilink Indonesia untuk memastikan ketersediaan dan kesiapan armada transportasi untuk arus mudik Idul Fitri 2023 yang memadai secara jumlah dan kualitas termasuk pengaturan alur penumpang serta penerapan protokol kesehatan dalam rangka menjamin pelaksanaan arus mudik yang aman, nyaman dan lancar.
 3. Komisi VI DPR RI meminta PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), Perum DAMRI dan PT Citilink Indonesia untuk melakukan koordinasi dengan instansi Kementerian/Lembaga untuk memastikan kelancaran arus mudik Idul Fitri Tahun 2023 termasuk terkait kebijakan tarif angkutan mudik yang terjangkau bagi masyarakat.

4. Komisi VI DPR RI meminta BUMN sektor transportasi untuk terus meningkatkan interkonektivitas angkutan darat, laut dan udara sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan perjalanan arus mudik Idul Fitri 2023.
 5. Komisi VI DPR RI meminta PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), Perum DAMRI dan PT Citilink Indonesia untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.
12. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero), PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II, PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Perum LPPNPI/Airnav Indonesia pada tanggal 10 April 2023, dengan pembahasan tentang Kesiapan BUMN Logistik, Infrastruktur, dan pendukung lainnya dalam menghadapi mudik puasa dan hari raya idul fitri tahun 2023, dengan kesimpulan antara lain :
1. Komisi VI DPR RI mendukung upaya PT Jasa Marga (Persero) Tbk., PT Pelabuhan Indonesia (Persero), PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II, PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk., dan Perum LPPNPI/AirNav Indonesia dalam memastikan kesiapan infrastruktur dan sarana transportasi menghadapi perjalanan pada masa Hari Raya Idul Fitri Tahun 2023.
 2. Komisi VI DPR RI meminta PT Jasa Marga (Persero) Tbk., PT Pelabuhan Indonesia (Persero), PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II, PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk., dan Perum LPPNPI/AirNav Indonesia untuk memastikan kualitas pelayanan, keamanan dan keselamatan termasuk mitigasi risiko atas kondisi darurat di setiap sarana/prasarana transportasi seperti bandara, pelabuhan, dan jalan tol.

3. Komisi VI DPR RI meminta PT Jasa Marga (Persero) Tbk., PT Utama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk., untuk mengantisipasi kemungkinan kepadatan dan kemacetan yang terjadi dengan melakukan rekayasa lalu lintas, menyediakan informasi kondisi lalu lintas secara *realtime* melalui aplikasi digital, serta memberikan pelayanan tanggap darurat yang cepat kepada masyarakat yang melakukan perjalanan pada masa Hari Raya Idul Fitri Tahun 2023.
4. Komisi VI DPR RI meminta PT Jasa Marga (Persero) Tbk., PT Pelabuhan Indonesia (Persero), PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II, PT Utama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk., dan Perum LPPNPI/AirNav Indonesia untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi lintas sektoral dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait untuk memastikan kelancaran perjalanan pada masa Hari Raya Idul Fitri Tahun 2023 dengan mengutamakan aspek keselamatan, keamanan, kesehatan dan kenyamanan masyarakat.
5. Komisi VI DPR RI meminta PT Jasa Marga (Persero) Tbk., PT Pelabuhan Indonesia (Persero), PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II, PT Utama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk., dan Perum LPPNPI/AirNav Indonesia untuk melaksanakan *survey* pelayanan selama masa Hari Raya Idul Fitri Tahun 2023 meliputi layanan pokok maupun layanan pendukung seperti *rest area*, toilet, dan lainnya.
6. Komisi VI DPR RI meminta PT Jasa Marga (Persero) Tbk., PT Pelabuhan Indonesia (Persero), PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II, PT Utama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk., dan Perum LPPNPI/AirNav Indonesia untuk tetap mengutamakan dan mendukung distribusi pangan, bahan bakar minyak (bbm) dan logistik pada masa Hari Raya Idul Fitri Tahun 2023.
7. Komisi VI DPR RI akan melakukan pengawasan di setiap sarana/prasarana transportasi seperti bandara, pelabuhan, terminal dan jalan tol dalam rangka memastikan kelancaran perjalanan pada masa Hari Raya Idul Fitri Tahun 2023.

8. Komisi VI DPR RI meminta PT Jasa Marga (Persero) Tbk., PT Pelabuhan Indonesia (Persero), PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II, PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk., dan Perum LPPNPI/AirNav Indonesia untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

13. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD, Perum Bulog, dan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) pada tanggal 11 April 2023, dengan pembahasan tentang kesiapan BUMN Pangan dan Perkebunan dalam menghadapi mudik puasa dan hari raya idul fitri tahun 2023, dengan kesimpulan antara lain :
 1. Komisi VI DPR RI mengapresiasi dan mendukung upaya PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ IDFOOD, Perum Bulog dan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dalam memastikan kesiapan BUMN pangan dan perkebunan menghadapi Hari Raya Idul Fitri Tahun 2023.
 2. Komisi VI DPR RI meminta PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ IDFOOD, Perum Bulog dan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) untuk melakukan koordinasi dengan instansi Kementerian/Lembaga untuk memastikan ketersediaan stock, ketepatan waktu distribusi dan stabilisasi harga pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri Tahun 2023.
 3. Komisi VI DPR RI mendesak PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ IDFOOD, Perum Bulog dan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) untuk fokus pada penguatan produksi pangan di sektor hulu, agar Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada impor dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional.
 4. Komisi VI DPR RI mendukung PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ IDFOOD dalam melaksanakan Program Penurunan Prevalensi Stunting dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.

5. Komisi VI DPR RI meminta PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ IDFOOD, Perum Bulog dan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.
-
14. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero) pada tanggal 11 April 2023, dengan pembahasan tentang kesiapan BUMN Energi dalam menghadapi mudik puasa dan hari raya idul fitri 1444H, dengan kesimpulan antara lain :
 1. Komisi VI DPR RI mendukung upaya PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam memastikan kesiapan BUMN Energi menghadapi Hari Raya Idul Fitri Tahun 2023.
 2. Komisi VI DPR RI meminta kepada PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk menyiapkan manajemen krisis terbaik dan berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya untuk mengantisipasi kejadian buruk yang mungkin terjadi.
 3. Komisi VI DPR RI meminta PT Pertamina (Persero) untuk melakukan koordinasi dengan instansi Kementerian/Lembaga guna memastikan ketersediaan stok, ketepatan waktu distribusi dan stabilisasi BBM menghadapi Hari Raya Idul Fitri Tahun 2023.
 4. Komisi VI DPR RI meminta kepada PT Pertamina (Persero) untuk memitigasi risiko yang mungkin terjadi akibat antrian pada SPBU.
 5. Komisi VI DPR RI mendesak PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk memastikan keamanan pasokan listrik dari hulu ke hilir di seluruh pembangkit di Indonesia menghadapi Hari Raya Idul Fitri Tahun 2023.
 6. Komisi VI DPR RI meminta kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk mensosialisasikan keamanan listrik terutama untuk rumah yg ditinggal menghadapi Hari Raya Idul Fitri Tahun 2023.
 7. Komisi VI DPR RI meminta PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

C. KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK/KUNJUNGAN KERJA RESES/KUNJUNGAN KERJA PENGAWASAN LUAR NEGERI KOMISI VI DPR RI

Pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023, Komisi VI DPR RI telah melaksanakan kunjungan kerja antara lain :

1. Kunjungan Kerja Spesifik Panja Transisi Energi ke Listrik Komisi VI DPR RI dalam rangka peninjauan perakitan sepeda motor listrik gesits, Pabrik Wika Industri Manufaktur (WIMA) Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada tanggal 16-18 Maret 2023.
2. Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dalam rangka peninjauan operasional PT Permodalan Nasional Madani ke Provinsi Bali, Kota Denpasar pada tanggal pada tanggal 24-26 Maret 2023.
3. Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dalam rangka peninjauan Pelabuhan Benoa PT Pelabuhan Indonesia (Persero) ke Provinsi Bali, Kota Denpasar pada tanggal pada tanggal 24-26 Maret 2023.
4. Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dalam rangka peninjauan Terminal BBM PT Pertamina Patra Niaga ke Provinsi Bali, Kota Denpasar pada tanggal pada tanggal 24-26 Maret 2023.
5. Kunjungan Kerja Panja Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Pelindungan Konsumen Komisi VI DPR RI ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Depok, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 4-6 April 2023.
6. Kunjungan Kerja Panja Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Pelindungan Konsumen Komisi VI DPR RI ke Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 4-6 April 2023.
7. Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI dalam rangka peninjauan terhadap progress pembangunan jalan tol cisumdawu dan evaluasi pelaksanaan mudik lebaran 1444H ke Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 2-6 Mei 2023.

8. Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI dalam rangka pembangunan Kawasan ekonomi industry terpadu Batang dan Kawasan industry Wijaya Kusuma, pengawasan kinerja perusahaan, progress PLTG tambak lorok ke Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 2-6 Mei 2023.
9. Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI dalam rangka pengawasan terhadap pengendalian harga pangan selama Ramadhan dan pasca lebaran 1444H, evaluasi pelaksanaan mudik lebaran 1444H ke Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 2-6 Mei 2023.
10. Kunjungan Kerja RUU Komisi VI DPR RI tentang Pelindungan Konsumen ke Sydney Australia pada tanggal 9-15 Mei 2023.
11. Kunjungan Kerja Diplomasi Parlemen/Pengawasan Komisi VI DPR RI tentang Pelindungan Konsumen ke Sydney Australia pada tanggal 9-15 Mei 2023.

IV. PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja Komisi VI DPR RI pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022 – 2023.

Jakarta, 20 April 2023

KABAGSET KOMISI VI DPR RI,

TTD.

DEWI RESMINI, S.E., M.Si

NIP. 19710407 199203 2 001